

Determinasi Kemiskinan di Jawa Tengah: Peran Belanja Pemerintah, Upah Minimum, dan PDRB

Handani Maheresmi^a, Siti Rokhimah^b, Estetika Mutiaranisa Kurniawati^c

^a Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, handani,maheresmi@upnyk.ac.id

^b Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, sitirokhimah@upnyk.ac.id

^c Universitas Sebelas Maret, estetika_mk@staff.uns.ac.id

*Corresponding Author: handani,maheresmi@upnyk.ac.id

Keywords:

Poverty, Minimum Wage, Government Expenditure, Gross Regional Domestic Product

Kata Kunci:

Kemiskinan, Upah Minimum, Belanja Bantuan Sosial, PDRB

ABSTRACT

This study analyses the effect of Social Assistance Expenditure, Regional Minimum Wage (UMR), and Regional Gross Domestic Product (PDRB) on Poverty Levels in 35 Regencies and Cities in Central Java Province during the period 2022–2023. A Robust Fixed Effect Model (FEM) was used after passing the Hausman Test. The results of the study show that, simultaneously, all three variables affect poverty. However, partially, no variable has a statistically significant effect. This reflects that the unique characteristics of each region have a significant influence. The research results indicate that Social Assistance Expenditure only serves as a buffer against poverty, the Minimum Wage has not reached the informal sector, and GDP growth has not been inclusive. Local governments need to prioritise reforms to make fiscal policies more effective.

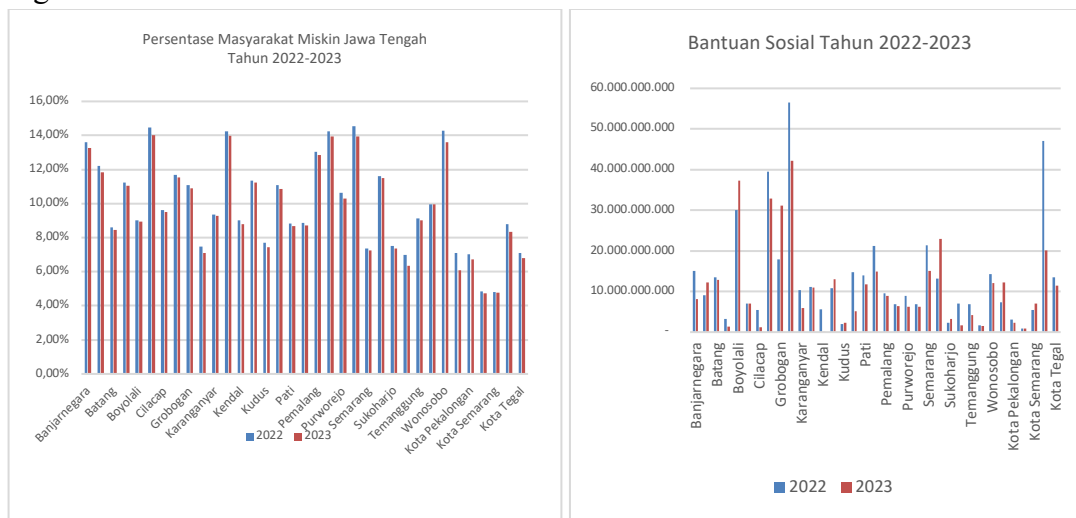
ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengaruh Belanja Bantuan Sosial, Upah Minimum Regional (UMR), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Tingkat Kemiskinan di 35 Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah selama periode 2022–2023. Model *Fixed Effect* (FEM) Robust digunakan setelah lolos Uji Hausman. Hasil riset menunjukkan bahwa secara simultan ketiga variabel tersebut memengaruhi kemiskinan namun secara parsial tidak ada variabel yang memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik. Hal ini mencerminkan bahwa pengaruh karakteristik unik tiap daerah sangat berpengaruh. Hasil riset mencerminkan bahwa Belanja Bantuan Sosial hanya menjadi penyangga kemiskinan, UMR belum menjangkau sektor informal dan pertumbuhan PDRB belum inklusif. Pemerintah daerah perlu memprioritaskan reformas untuk menjadikan kebijakan fiskal lebih efektif.

PENDAHULUAN

Salah satu hal yang diungkapkan pada Pembukaan UUD 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum (Bkpm, 2021). Kesejahteraan Masyarakat merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh setiap pemerintah di setiap negara kondisi tingkat kemiskinan merupakan salah satu indikator dalam evaluasi kebijakan pembangunan untuk menggambarkan status kesejahteraan ekonomi masyarakat di Indonesia (Alfina, 2023). Kemiskinan yang berkepanjangan akan menghambat perkembangan nasional dan regional (Murialti et al., 2025).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada Maret 2025 terdapat sekitar 23,85 juta jiwa yang tergolong penduduk miskin di Indonesia (Wicaksono, 2025). Pada level regional, yaitu Jawa Tengah, berdasarkan survey dari BPS, pada Maret 2024 mencatat bahwa Jawa Tengah memiliki tingkat kemiskinan sebesar 10,47 persen, atau sekitar 3,7 juta penduduk. Persentase tersebut berada di atas rata-rata kemiskinan nasional yang mencapai 9,03 persen (Kompas, 2024). Fakta ini tentunya menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Indonesia khususnya pada level regional.



Gambar 1. Grafik Persentase Masyarakat Miskin di Jawa Tengah Tahun 2022-2023
Sumber: BPS (Data diolah, 2025)

Gambar 2. Pengeluaran Pemerintah Daerah dalam bentuk Bantuan Sosial Pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2022-2023
Sumber: LKPD dan BPS (Data diolah, 2025)

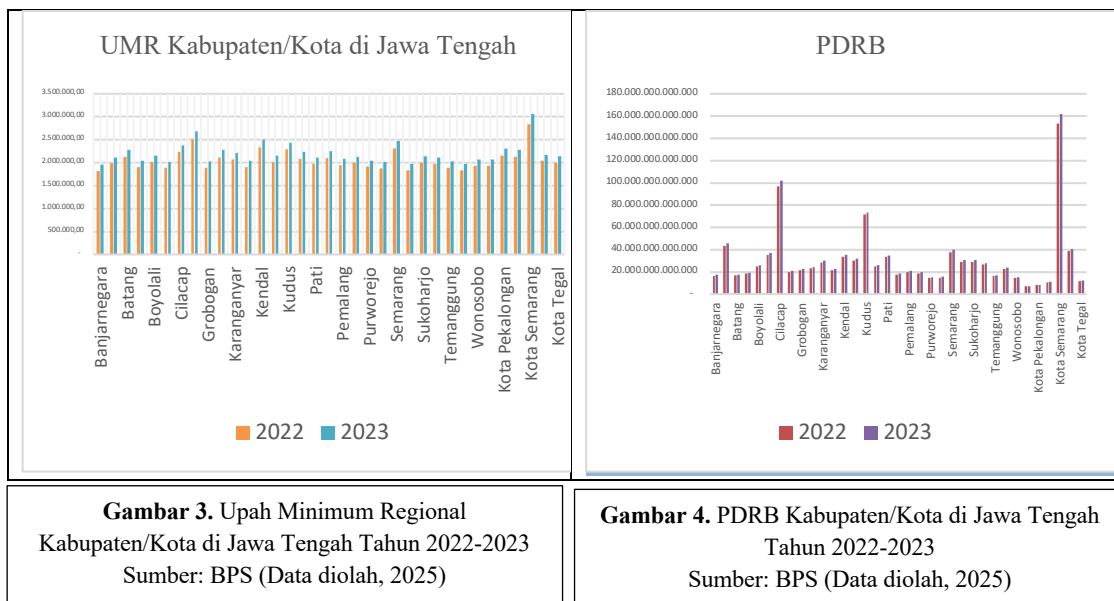
Berdasarkan grafik pada gambar 1, terlihat bahwa persentase masyarakat miskin di Jawa Tengah berangsur menurun dari tahun 2022 ke tahun 2023. Data kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2022–2023 menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten/kota mengalami penurunan persentase penduduk miskin pada tahun 2023. Tren ini mencerminkan adanya perbaikan kondisi sosial ekonomi di berbagai wilayah, meskipun tingkat penurunannya tidak seragam. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa meskipun Jawa Tengah bergerak menuju kondisi kemiskinan

yang lebih rendah, upaya pengentasan kemiskinan tetap perlu diperkuat, khususnya di wilayah yang masih memiliki angka kemiskinan tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang belum optimal. Pendekatan pembangunan yang lebih terarah, termasuk pengembangan kompetensi masyarakat, pembukaan lapangan kerja yang lebih luas, dan penguatan program perlindungan sosial, menjadi strategi penting untuk mempercepat penurunan kemiskinan secara merata di seluruh kabupaten dan kota.

Pemerintah juga telah melakukan berbagai cara untuk membantu masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya, melalui skema bantuan sosial. Pada gambar 2, disajikan grafik bantuan sosial yang diberikan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Berdasarkan gambar 2, data alokasi anggaran penanganan kemiskinan di Jawa Tengah menunjukkan variasi yang cukup besar antarwilayah. Pada tahun 2023, sebagian besar daerah mengalami penurunan anggaran dibandingkan tahun sebelumnya, sementara beberapa wilayah justru mencatat peningkatan. Perubahan ini menggambarkan adanya perbedaan kebutuhan dan prioritas penanganan kemiskinan di tiap daerah. Selain itu, terlihat adanya disparitas kapasitas fiskal, di mana beberapa kabupaten/kota memiliki alokasi dana yang jauh lebih besar dibandingkan daerah lainnya. Secara keseluruhan, dinamika tersebut menunjukkan bahwa upaya penanganan kemiskinan berjalan dengan intensitas yang tidak seragam di seluruh wilayah Jawa Tengah.

Kemiskinan direpresentasikan melalui indikator tingkat kemiskinan, yaitu proporsi penduduk di setiap provinsi yang hidup di bawah garis kemiskinan. BPS menetapkan garis kemiskinan sebagai ambang batas moneter, diperoleh dari perhitungan pendapatan minimum yang diperlukan untuk mengakomodasi kebutuhan dasar masyarakat (Agussalim et al., 2024). Perbedaan tingkat kemiskinan antarwilayah kerap berkaitan dengan kemampuan pendapatan yang diterima pekerja. Ketika upah minimum berada di bawah kebutuhan hidup layak, rumah tangga lebih sulit memenuhi kebutuhan dasar. Kondisi tersebut menjadikan penetapan UMR sebagai salah satu unsur yang dapat memperbaiki daya beli masyarakat berpendapatan rendah. Gambar 3 menyajikan potret upah minimum regional yang diterima oleh masyarakat yang berada pada berbagai kabupaten/kota dalam lingkup wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Merujuk pada gambar 3, UMR di berbagai wilayah Jawa Tengah menggambarkan peningkatan tiap tahun. Pertumbuhan ini mencerminkan adanya penyesuaian terhadap kebutuhan hidup masyarakat yang terus berkembang. Secara umum, pola tersebut menegaskan bahwa standar upah regional bergerak selaras dengan dinamika ekonomi setempat. Pemerintah harus fokus menjaga stabilitas harga untuk mempertahankan Tingkat upah dan daya beli serta meningkatkan PDRB riil untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia (Feriyanto et.al, 2020). Gambar 4 menyajikan kondisi PDRB Kabupaten/Kota di Indonesia.



Gambar 4 menunjukkan bahwa nilai PDRB di berbagai wilayah mengalami peningkatan dari tahun 2022 ke 2023. Kenaikan ini mencerminkan adanya pergerakan ekonomi yang semakin kuat, terlihat dari bertambahnya nilai produksi dan aktivitas usaha pada tahun berikutnya. Secara keseluruhan, tren tersebut menggambarkan pertumbuhan ekonomi yang terus bergerak positif di tingkat regional.

Perubahan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah menunjukkan dinamika yang berbeda antarwilayah. Dengan adanya peningkatan belanja pemerintah, penyesuaian upah minimum, dan pertumbuhan PDRB, diperlukan analisis untuk memahami peran ketiga faktor tersebut dalam memengaruhi kondisi kemiskinan di daerah tersebut.

Perubahan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah menunjukkan dinamika yang berbeda antarwilayah. Dengan adanya peningkatan belanja pemerintah, penyesuaian upah minimum, dan pertumbuhan PDRB, diperlukan analisis untuk memahami peran ketiga faktor tersebut dalam memengaruhi kondisi kemiskinan di daerah tersebut.

Perbedaan karakter unik tiap daerah di Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah dapat diukur menggunakan metode penelitian melalui Model *Fixed Effect* Robust dengan menggunakan alat analisis *evIEWS*. Model *Fixed Effect* (FEM) merupakan alat untuk menganalisis data panel karena dapat menghilangkan bias sehingga dapat mengatasi masalah penelitian secara khusus menggunakan pendekatan *Fixed Effect* dengan *Clustered Robust Standard Errors*. Metode *robust* berfungsi sebagai koreksi secara langsung agar tetap akurat. Hal ini memungkinkan untuk menarik kesimpulan yang lebih kuat mengenai hubungan yang diteliti dan sebagai gap penelitian pada aspek metodologis.

Penelitian ini berfokus untuk mengetahui bagaimana belanja pemerintah, upah minimum, dan PDRB berhubungan dengan kondisi kemiskinan di Jawa Tengah. Peneliti mempunyai harapan bahwasanya hasil penelitian dapat memberikan pemahaman empiris mengenai peran belanja pemerintah, upah minimum, dan PDRB dalam menjelaskan dinamika kemiskinan, sehingga dapat mendukung penyusunan kebijakan daerah yang lebih tepat.

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Kemiskinan masih menjadi persoalan yang lazim terjadi di banyak negara berkembang, karena sebagian kelompok masyarakat tidak mampu memenuhi standar kehidupan yang layak (Tope et al., 2025). Persentase penduduk miskin adalah jumlah orang di bawah garis kemiskinan dibagi dengan total penduduk pada periode yang sama (Murialti et al., 2025). Kemiskinan dapat diartikan sebagai kondisi dimana individu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (Riyandini, 2024). Situasi tersebut semakin memburuk karena adanya kemiskinan antargenerasi, dimana anak-anak menghadapi hambatan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan akibat kondisi sosial ekonomi yang diwariskan dari orang tua mereka (Anggrasari & Hanri, 2025).

Kemiskinan, sebagai akibat dari kegagalan pembangunan ekonomi, harus terus ditekan dan solusi dicari, sehingga kemiskinan tidak lagi menimbulkan dampak negatif bagi negara (Feriyanto et.al, 2020). Akibat berbagai masalah sosial dan ekonomi, kemiskinan masih menjadi masalah global yang terutama mempengaruhi populasi yang paling rentan di dunia, terutama di negara-negara berkembang (Teeson & Sivadas, 2024). Kemiskinan menjadi salah satu isu pokok yang mendapat perhatian serius dari setiap pemerintah di setiap negara (Saefullah, 2023). Sebagai negara berkembang, Indonesia juga perlu memberikan perhatian khusus pada masalah ini. Kemiskinan merupakan salah satu persoalan penting yang terus menjadi fokus perhatian pemerintah Indonesia (Wahyuningsih et al., 2020).

Belanja pemerintah memberikan peran yang beragam dalam pengentasan kemiskinan, dengan efektivitasnya bervariasi di berbagai wilayah dan konteks. Anjande et.al. (2022) menemukan bahwa pengeluaran pemerintah dan investasi langsung asing secara signifikan mengurangi kemiskinan di negara-negara Afrika Sub-Sahara (Murialti et al., 2025). Keterlibatan pemerintah menjadi elemen penting dalam mendorong upaya penanggulangan kemiskinan (Riyandini, 2024). Hal ini bisa diwujudkan melalui anggaran pemerintah yang direalisasikan dalam bentuk pemberian bantuan dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Murialti et al. (2025) disebutkan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan indikator untuk pos-pos pengeluaran pemerintah, yaitu pengeluaran bantuan sosial (bansos). Program bantuan sosial berfungsi memenuhi kebutuhan dasar individu dan rumah tangga miskin, mencakup dukungan di bidang pangan, pendidikan, kesehatan,

perumahan, sanitasi, serta akses air bersih (Ayu, D.P & Prabowo, 2021).

Berdasarkan kerangka pemikiran dan penelitian terdahulu dirumuskan hipotesis

H1: Belanja bantuan sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Dalam konsep kemiskinan, berbagai aspek diperhitungkan, mulai dari standar hidup, pendidikan, dan kesehatan, juga pada aspek tradisional seperti konsumsi dan pendapatan (Teeson & Sivadas, 2024). Kesenjangan pendapatan menjadi salah satu faktor utama yang turut menyebabkan terjadinya kemiskinan (Tope et al., 2025). Seseorang dianggap berada dalam situasi kemiskinan moneter ekstrem oleh Bank Dunia jika penghasilan mereka kurang dari \$2,15 per hari (García-Pérez, 2023).

Dalam kinerja makroekonomi yang baik, peningkatan produktivitas akan mendorong perusahaan memiliki kapasitas yang lebih besar untuk memberikan upah yang lebih tinggi kepada pekerjanya. Perpaduan antara globalisasi, industrialisasi, dan kemajuan teknologi telah mendorong peningkatan efisiensi ekonomi serta produktivitas. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah dapat mengambil langkah kebijakan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan akses pendidikan dan pelatihan kerja guna meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Selain itu, meskipun perusahaan telah menyesuaikan diri dengan ketentuan yang berlaku, pemerintah Indonesia tetap menerapkan kebijakan upah minimum sebagai bentuk perlindungan terhadap pekerja (Fahrudin & Endrawati, 2022).

Upah minimum didefinisikan sebagai jumlah minimum kompensasi moneter yang secara hukum wajib dibayarkan kepada pekerja atas jasa yang disumbangkan, diukur berdasarkan durasi kerja atau hasil kerja. Jumlah ini tidak dapat ditiadakan atau dikurangi di bawah batas yang ditetapkan melalui kesepakatan kontraktual, baik kolektif maupun individual. Kebijakan upah minimum memiliki fungsi untuk menjamin kapasitas daya beli minimum pekerja dan keluarganya dengan mempertimbangkan parameter ekonomi dan sosial yang berlaku secara nasional. (Paz-b & Celia, 2024). Pemberi kerja atau pelaku industri menggunakan upah minimum sebagai acuan untuk membayar karyawan di lingkungan bisnis atau tempat kerja (Saefullah, 2023). Upah berfungsi sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok berpendapatan rendah, khususnya pekerja yang berada pada kategori miskin (Wahyuningsih et al., 2020). Banyak peneliti percaya bahwa kenaikan upah minimum meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperbaiki standar hidup mereka (Jadoon, 2021)

Pekerja miskin mungkin mengalami penurunan tingkat kemiskinan akibat upah minimum, tetapi secara umum, tingkat kemiskinan meningkat bagi mereka yang menjadi pengangguran akibat kenaikan upah minimum (Jadoon, 2021). Meskipun beberapa pekerja mengalami peningkatan pendapatan mereka akibat kenaikan upah minimum, belum diketahui apakah hal ini akan meningkatkan pendapatan keluarga

miskin (Jadoon, 2021). Penelitian dari Feriyanto et.al (2020) mengungkapkan bahwa upah memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kemiskinan di provinsi-provinsi di Indonesia, sementara PDRB riil memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.

Berdasarkan kerangka pemikiran dan penelitian sebelumnya dirumuskan hipotesis

H2: Upah minimum regional memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Sadono Sukirno menegaskan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB), baik dihitung atas dasar harga berlaku maupun harga konstan, memiliki peran penting dalam menggambarkan kondisi perekonomian suatu negara pada periode tertentu. Secara teknis, PDB mengacu pada nilai total barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara oleh seluruh faktor produksi, baik domestik maupun asing. Sementara itu, untuk tingkat wilayah digunakan indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB juga dihitung dalam dua bentuk, yaitu berdasarkan harga berlaku dan harga konstan (Saefullah, 2023).

Keberhasilan pembangunan dan penurunan tingkat kemiskinan umumnya dilihat dari dinamika pertumbuhan ekonomi, yang antara lain dapat dilihat dari besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Ladjin et al., 2024). PDRB adalah salah satu indikator makroekonomi yang dapat menunjukkan kondisi ekonomi suatu wilayah setiap tahun (Agus et al., 2022). PDRB per kapita: Ini diukur melalui produk domestik regional bruto per kapita pada harga nominal (Agussalim et al., 2024).

Berdasarkan kerangka pemikiran dan riset terdahulu dirumuskan hipotesis

H3: Produk domestik regional bruto memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan

Belanja pemerintah dan laju pertumbuhan penduduk memiliki kontribusi terhadap tingkat kemiskinan di daerah (Putri, 2025). Peningkatan upah minimum provinsi dan laju pertumbuhan ekonomi secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di daerah (Sutrisno, 2022). Belanja bantuan sosial, upah minimum regional, dan produk domestik regional bruto memiliki determinan bagi tingkat kemiskinan dan dapat menjelaskan kombinasi instrumen tersebut secara bersama-sama.

Berdasarkan kerangka pemikiran dan riset sebelumnya dirumuskan hipotesis

H4: Belanja bantuan sosial, upah minimum regional dan produk domestik regional bruto secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berdasarkan pendekatan kuantitatif. Fokus utama terhadap pengukuran data numerik dan dianalisis menggunakan statistik untuk menguji hipotesis penelitian. Analisis dalam penelitian ini didasarkan pada data panel, yaitu suatu struktur data yang mengintegrasikan observasi deret waktu (*time series*) dengan observasi antar unit (*cross-section*). Penggunaan model data panel dapat mengendalikan pengaruh dari variabel independen yang berubah seiring waktu karena perbedaan yang tidak teramati (Bell et al., 2019).

Pengamatan dalam penelitian ini menggunakan data selama dua tahun yaitu tahun 2022 dan 2023. Populasi penelitian meliputi 35 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah, sehingga jumlah total data yang diobservasi adalah tujuh puluh. Basis data sekunder bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit dan Badan Pusat Statistik. Variabel dependen adalah tingkat kemiskinan dan variabel independen adalah Belanja Bantuan Sosial, Upah Minimum Regional (UMR), serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Alat analisis yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antar variabel adalah EViews. Model penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Poverty\ Rate(i,t) = \beta_0 + \beta_1 . SFE(i,t) + \beta_2 . MW(i,t) + \beta_3 . GDRP(i,t) + \mu_i + \varepsilon_{i,t}$$

Keterangan:

$Poverty\ Rate_{i,t}$	: tingkat kemiskinan di kabupaten/kota i pada tahun t
$SFE_{i,t}$	: belanja bantuan sosial di kabupaten/kota i pada tahun t
$MW_{i,t}$	: upah minimum regional di kabupaten/kota i pada tahun t
$GDRP_{i,t}$	: produk domestik regional bruto kabupaten/kota i pada tahun t
β_0	: konstanta
$\beta_1 \beta_2 \beta_3$	: koefisien regresi variabel independent
μ_i	: efek daerah (<i>fixed effect</i>) yang tidak teramati
$\varepsilon_{i,t}$	: komponen <i>error</i> yang berubah seiring waktu

Model pengujian menggunakan uji chow dan uji hausman untuk menentukan model yang tepat karena populasi penelitian memiliki karakteristik unik tiap daerah serta uji asumsi klasik untuk menganalisis hubungan dan menggambarkan kondisi sebenarnya. Model ini dapat menghasilkan nilai-nilai signifikansi yang dapat digunakan untuk menjawab isu-isu di di riset tersebut.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis dilakukan untuk mengetahui pengaruh belanja pemerintah, UMR dan PDRB terhadap tingkat kemiskinan sebagai variabel dependen. Tabel statistik deskriptif menyajikan ringkasan data 70 observasi yang digunakan dalam penelitian menggunakan nilai asli berdasarkan mata uang rupiah.

Tabel 1. Statistik Deskriptif (n=70)

Variabel	Minimum	Maksimum	Rata-Rata
Belanja Bantuan Sosial (Rp)	165.600.000	56.584.495.000	12.234.026.803
UMR (Rp)	1.819.835	3.060.349	2.125.608
PDRB (Rp)	6.889.452.530.000	161.849.112.440.000	30.728.600.500.429
Tingkat kemiskinan (%)	4,3%	14,53%	9,84%

Sumber: data diolah, 2025

Tabel tersebut menjelaskan adanya selisih cukup besar tiap variabel antara nilai minimum dan maksimum. Selisih belanja bantuan sosial sebesar Rp56.418.895.000, upah minimum regional sebesar Rp1.240.514, PDRB sebesar Rp154.959.659.910.000 dan tingkat kemiskinan sebesar 9,8%. Presentase kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah pada 35 Kabupaten dan Kota menunjukkan variasi yang cukup tinggi selama periode penelitian. Kesenjangan Belanja Bantuan Sosial dalam alokasi anggaran menunjukkan adanya tantangan dalam penentuan kebutuhan dan kapasitas fiskal daerah. Variasi variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tiap Kabupaten dan Kota menjelaskan kesenjangan pembangunan ekonomi regional di Jawa Tengah karena terkonsentrasi di pusat kota atau industri tertentu. Berbeda dengan variabel Upah Minimum Regional (UMR) yang cukup homogen. Variabel tersebut dihadapkan dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, mengindikasikan bahwa UMR belum optimal mengatasi kesenjangan antara upah formal yang ditetapkan dengan upah riil pekerja di sektor ekonomi skala kecil. Variasi tersebut mencerminkan karakteristik tiap daerah antar daerah, sehingga diperlukan pengujian model hubungan yang tepat.

Sebelum melakukan uji regresi data panel, dilakukan transformasi logaritma untuk variabel independen karena nilai variabel adalah nilai nominal mata uang dan variabel dependen adalah presentase jumlah masyarakat miskin dengan total jumlah masyarakat di suatu daerah (tingkat kemiskinan). Transformasi tersebut juga bertujuan memperhitungkan karakteristik unik setiap daerah dan pengaruh nilai outlier.

Estimasi regresi data panel dilakukan dengan menggunakan aplikasi Eviews. Tahap awal dan krusial dalam analisis ini adalah penentuan model estimasi yang paling sesuai yaitu antara *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), atau *Random Effect Model* (REM) melalui serangkaian pengujian seperti Uji Chow dan Uji Hausman.

Tabel 2. Uji Random Effects – Uji Hausman

Variabel	FEM	REM	Probabilitas
Belanja bantuan sosial	-0.017224	-0.016829	0.9697
UMR	-9.457371	-4.642834	0.2960
PDRB	7.292826	0.135857	0.2733

	Nilai output	Tingkat signifikansi (α)	Keputusan
Probabilitas	0.0165	0.05	Tolak H_0

Sumber: data diolah, 2025

Tabel tersebut membandingkan uji regresi menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM). Melalui Uji Hausman, ditemukan bahwa nilai probabilitas sebesar 0.0165, menjelaskan bahwa lebih tepat menggunakan model FEM untuk mengestimasi hubungan variabel Belanja Bantuan Sosial, UMR, dan PDRB terhadap tingkat kemiskinan. Hasil tersebut mencerminkan hubungan antar variabel independen dengan faktor-faktor unik yang melekat pada setiap Kabupaten dan Kota seperti kondisi geografis dan budaya sangat signifikan dan harus dikendalikan oleh model untuk mendapatkan estimasi yang konsisten.

Model akhir yang digunakan untuk interpretasi adalah *Fixed Effect Model* (FEM) dengan Koreksi *Robust Standard Error* (*White cross-section cluster*) untuk mengatasi masalah dalam uji asumsi klasik yaitu uji multikolinearitas dan heterokedastisitas yang disebabkan oleh penggunaan rentang data hanya selama dua tahun dan perbedaan antar skala unit yaitu kabupaten dan kota yang cukup signifikan. Model ini berfungsi memperbaiki standard error dari koefisien, sehingga nilai signifikansi (*p-value*) yang disajikan valid. Dengan demikian, model FEM Robust menjadi dasar untuk menguji pengaruh variabel belanja bantuan sosial, UMR, dan PDRB terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 3. Koefisien Determinasi

Statistik	Nilai
Adjusted R-squared	0,9951

Sumber: data diolah, 2025

Nilai *Adjusted R-squared* menunjukkan bahwa variasi tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen dan karakteristik unik dari setiap daerah sebesar 99,51%. Hal ini menjelaskan bahwa model tersebut sangat baik dalam mengestimasi tingkat kemiskinan daerah di Provinsi Jawa Tengah. Nilai tinggi dipengaruhi karena memasukkan variabel *dummy* untuk setiap Kabupaten dan Kota. Variabel *dummy* berfungsi untuk mengontrol perbedaan spesifik antar unit pengamatan (Kabupaten dan Kota) yang tidak dapat diukur oleh variabel kuantitatif.

Tabel 4. Uji Signifikansi Parsial (uji t)

Variabel	Koefisien	Prob. (p-value)
Belanja bantuan sosial	-0.017224	0.8624
UMR	-9.457371	0.3753
PDRB	7.292826	0.6188

Sumber: data diolah, 2025

Hasil mencerminkan bahwa nilai probabilitas belanja bantuan sosial sebesar 0.8624 lebih besar dari 0.05 maka pengaruh bantuan sosial terhadap tingkat kemiskinan tidak signifikan. Nilai probabilitas UMR sebesar 0.3753 lebih besar dari 0.05 sehingga pengaruh UMR terhadap tingkat kemiskinan tidak signifikan. Nilai probabilitas PDRB sebesar 0.6188 lebih besar dari 0.05 maka pengaruh PDRB terhadap tingkat kemiskinan tidak signifikan. Hasil FEM Robust menunjukkan bahwa semua variabel independen secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Tabel 5. Uji Signifikansi Simultan (uji F)

Statistik	Nilai
F-statistic	380.7585

Sumber: data diolah, 2025

Berdasarkan hasil estimasi *Fixed Effect* Model (FEM) Robust menunjukkan bahwa variabel independen Belanja Bantuan Sosial, UMR dan PDRB secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Pengaruh Belanja Bantuan Sosial terhadap Tingkat Kemiskinan

Hasil analisis menunjukkan bahwa belanja bantuan sosial tidak mempengaruhi tingkat kemiskinan di suatu daerah. Hasil uji parsial menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan nilai probabilitas sebesar 0.8624. Hasil ini berbeda dengan penelitian Putri (2025) menunjukkan adanya pengaruh belanja pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan walaupun belum optimal. Penelitian Aprilia (2022) mendukung penelitian ini karena belanja pemerintah secara parsial tidak mempengaruhi tingkat kemiskinan. Temuan Agustin & Sumarsono (2022) secara khusus juga menggambarkan bahwa tidak ada pengaruh belanja bantuan sosial terhadap tingkat kemiskinan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial menjelaskan bentuk dari bantuan sosial terdiri dari uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah menyalurkan

bantuan sosial kepada masyarakat. Masalah yang muncul adalah sasaran yang belum secara inklusif merata secara optimal bagi penerima bantuan sosial dan memenuhi kriteria masyarakat miskin. Faktor karakteristik unik daerah yang dijelaskan dengan model *fixed effect* seperti kondisi geografis, kondisi budaya dan lainnya sebagai penentu tingkat kemiskinan.

Pengaruh Upah Minimum Regional (UMR) terhadap Tingkat Kemiskinan

Analisis ini menjelaskan bahwa secara parsial, upah minimum regional tidak mempengaruhi tingkat kemiskinan di daerah dengan nilai probabilitas 0.3757. Temuan ini mendukung riset sebelumnya bahwa upah minimum regional belum mampu mengentaskan kemiskinan karena pertumbuhan upah minimum dipengaruhi oleh faktor inflasi Husni, et.al (2023) dan Sutrisno (2022) juga menunjukkan tidak ada pengaruh upah minimum regional secara parsial. Feriyanto et.al (2020) menjelaskan penyebabnya karena mayoritas masyarakat Indonesia masih tergantung terhadap upah harian.

Peraturan upah minimum regional lebih mengikat pada sektor usaha atau bidang formal resmi dan terdaftar yang wajib mematuhi peraturan hukum. Masyarakat yang berada di kriteria miskin lebih banyak bekerja di di sektor informal sehingga tidak terikat oleh peraturan upah minimum. Walaupun kebijakan upah minimum regional cenderung mengalami kenaikan setiap tahun, tetapi belum berfungsi sebagai alat yang efektif untuk mengurangi ketimpangan upah minimum masyarakat yang bekerja di sektor informal. Masalah lain adalah peningkatan biaya tenaga dapat memicu industri untuk melakukan pengurangan tenaga kerja. Ketika pemberi kerja dihadapkan pada biaya upah minimum lebih tinggi, mereka akan merespon dengan mengurangi jumlah karyawan yang mengakibatkan peningkatan jumlah pengangguran dan jumlah masyarakat miskin.

Upah minimum ditentukan didasarkan berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Kebijakan tersebut lebih berfokus pada investasi dan pencegahan pemutusan hubungan kerja massal dibandingkan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bekerja. Pemerintah daerah perlu mendukung program pelatihan dan masyarakat dapat terbantu dengan modal usaha supaya masyarakat yang bekerja di sektor informal mendapat upah yang proposional.

Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Tingkat Kemiskinan

Hasil temuan mengkaji bahwa PDRB tidak mempengaruhi tingkat kemiskinan dengan nilai probabilitas sebesar 0.6188. Hasil ini didukung dari riset yang menjelaskan bahwa ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah mengakibatkan belum efektifnya pengurangan tingkat kemiskinan meskipun PDRB tinggi. (Sinaga, 2020). Temuan Yoga, G.A.D.M & Diputra, (2024) dan (Dahliah & Nur, 2021) juga menjelaskan bahwa PDRB tidak memengaruhi secara parsial dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Hal ini tidak sejalan dengan temuan Muryani and Larasati (2024) yang menjelaskan bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata terjadi karena pertumbuhan didorong oleh industri yang lebih banyak menggunakan teknologi, bukan tenaga kerja. Akibatnya, kelompok miskin tidak mendapat pekerjaan dan manfaat langsung dari pertumbuhan tersebut.

Masalah ini terjadi karena PDRB lebih fokus mengukur ukuran ekonomi dan laju pertumbuhannya, tetapi belum mengukur kualitas pertumbuhan di bidang lain seperti kesenjangan distribusi pendapatan masyarakat atau lapangan pekerjaan. Beberapa faktor yang biasanya terjadi di daerah adalah banyak masyarakat miskin yang bekerja di bidang pertanian dengan tingkat produktivitas rendah dan di sektor informal sehingga membatasi masyarakat miskin berpartisipasi dalam pertumbuhan PDRB. Pemerintah perlu membuat kebijakan investasi dan insentif pada sektor usaha yang mengelola potensi daerah, seperti perkebunan, peternakan atau pariwisata. PDRB dapat mengentaskan kemiskinan jika masyarakat mendapatkan akses yang sama termasuk tingkat pendidikan sehingga masyarakat miskin mampu berpartisipasi dan mendapatkan manfaat pertumbuhan ekonomi daerah.

Pengaruh Belanja Pemerintah, UMR dan PDRB secara simultan terhadap Tingkat Kemiskinan

Hasil analisis menggambarkan bahwa secara simultan ketiga variabel tersebut berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di daerah. Hal ini sejalan dengan riset Putri (2025) dan Sutrisno (2022). UMR dan pertumbuhan yang tidak inklusif menunjukkan bahwa masalah utama kemiskinan bersifat struktural dan unik di setiap daerah. Ketika Belanja Bantuan Sosial, UMR, dan PDRB diukur sebagai satu kesatuan paket kebijakan, dapat memiliki pengaruh yang valid. Hal ini menjelaskan bahwa perumusan kebijakan harus mempertimbangkan semua faktor secara komprehensif.

Belanja Bantuan Sosial merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang mewajibkan alokasi anggaran untuk urusan wajib pelayanan dasar. Kepatuhan dalam menentukan upah minimum regional

adalah penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai alat kebijakan untuk menekan ketimpangan pendapatan. Produk domestik regional bruto mencerminkan target pembangunan daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Variabel tersebut merupakan upaya dan wewenang pemerintah untuk mengentaskan tingkat kemiskinan.

Pengaruh Model *Fixed Effects* menunjukkan ada pengaruh karakteristik unik tiap daerah sehingga setiap daerah memiliki masalah kemiskinan yang berbeda. Pemerintah harus fokus terhadap peningkatan secara kuantitatif yaitu nilai UMR atau nilai PDRB untuk perbaikan kualitas di Kabupaten dan Kota. Kebijakan yang komprehensif terkait belanja bantuan sosial, upah minimum regional, dan PDRB harus dapat mengatasi *fixed effect* yang menjadi penghambat utama pengentasan kemiskinan.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis Regresi Data Panel menggunakan model *Fixed Effect Model* (FEM) Robust terhadap 35 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2022-2023, menjelaskan bahwa secara simultan, variabel Belanja Bantuan Sosial, UMR, dan PDRB berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hasil ini menunjukkan bahwa upaya mengentaskan kemiskinan harus dilakukan secara terpadu melalui koordinasi untuk membentuk tiga instrumen kebijakan.

Penelitian ini mengisi gap empiris dan metodologi terkait determinan kemiskinan regional, khususnya melalui penerapan Model *Robust Fixed Effect* yang merupakan keterbaruan dari studi ini. Model *Robust Fixed Effect* (FEM Robust) secara efektif mengakomodasi karakteristik unik yang tidak terukur dari 35 Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah. Metode ini memberikan pandangan yang *robust* dan valid dalam menjelaskan tiap variabel. Penelitian ini memasukkan faktor-faktor unik dalam analisis tingkat kemiskinan.

Temuan empiris mengindikasikan bahwa instrumen Bantuan Sosial, UMR, dan PDRB saat ini belum berdampak secara optimal, dimana Bantuan Sosial belum berdampak jangka panjang, UMR belum optimal menjangkau sektor informal dan pertumbuhan ekonomi (PDRB) belum bersifat inklusif. Kesimpulan ini menjelaskan pentingnya reformasi kebijakan fiskal yang terfokus dan inklusif oleh Pemerintah Daerah untuk mengurangi kemiskinan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Pentingnya pembenahan sistem dan peningkatan kualitas layanan publik di tingkat kabupaten dan kota. Pemerintah daerah perlu menetapkan fokus prioritas pada empat pilar pembangunan melalui peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan untuk modal manusia, serta perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk percepatan pertumbuhan ekonomi lokal.

Rekomendasi penelitian selanjutnya adalah perlu membuat klasterisasi tiap daerah yang karakteristiknya mirip dan menambah data tahun pengamatan. Pendekatan kualitatif melalui wawancara juga diperlukan untuk menganalisis lebih mendalam terkait kebijakan pengentasan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, I., Priadana, M. S., & Sari, I. P. (2022). Poverty Reduction in Central Java Province Indonesia Through The Tourism Sector. *Journal of Economic Development, Environment and People*, 11(1), 73–83.
- Agussalim, A., Nursini, N., Suhab, S., Kurniawan, R., Samir, S., & Tawakkal, T. (2024). The Path to Poverty Reduction : How Do Economic Growth and Fiscal Policy Influence Poverty Through Inequality in Indonesia ? *Economies*, 1–18.
- Agustin, L., & Sumarsono, H. (2022). *Pengaruh Pengangguran , IPM , Dan Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur Bantuan Sosial Terhadap*. 7(2).
- Alfina, W. R. A. (2023). Analisis Regresi Data Panel Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bali Tahun 2012-2021. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 7(1), 106–114.
- Anggrasari, F. P., & Hanri, M. (2025). Breaking the Poverty Cycle : Impact of Social Assistance on Intergenerational Poverty. *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, 6(2), 225–238. <https://doi.org/10.46456/jisdep.v6i2.733>
- Aprilia, Y. (2022). Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2010-2019. *Jurnal Konstanta: Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 45–60.
- Ayu, D.P & Prabowo, P. S. (2021). Analisis Pengaruh Belanja Bantuan Sosial, Pendidikan dan Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018. *INDEPENDENT: Journal of Economics*, 1 Nomor 1, 170–185.
- Bell, A., Fairbrother, M., Jones, K., & Bell, A. (2019). Fixed and random effects models : making an informed choice. *Quality & Quantity*, 53(2), 1051–1074. <https://doi.org/10.1007/s11135-018-0802-x>
- Bkpm. (2021). Upaya Pemerintah Memajukan UMKM Indonesia | BKPM. In <https://www.bkpm.go.id/> (pp. 5–7).
- Dahliah, D., & Nur, A. N. (2021). *The Influence of Unemployment , Human Development Index and Gross Domestic Product on Poverty level*. 1(2), 95–108.
- Fahruddin & Endrawati, D. (2022). Determinants of working poverty in Indonesia. *Journal of Economics Development*, Vol. 24 No(DOI 10.1108/JED-09-2021-0151), 230–246. <https://doi.org/10.1108/JED-09-2021-0151>
- Feriyanto, N. et. a. (2020). The Impact of Unemployment , Minimum Wage , and Real Gross Regional Domestic Product on Poverty Reduction in Provinces of Indonesia. *Asian Economic and Financial Review*, 10(January), 1088–1099. <https://doi.org/10.18488/journal.aefr.2020.1010.1088.1099>
- García-Pérez, A. C. & C. (2023). *Journal of Poverty and Social Justice*. 31(2). <https://doi.org/10.1332/175982721X16760450929081>

- Husni, et. a. (2023). (n.d.). *Upah Minimum dan Tingkat Kemiskinan: Studi Kebijakan di Indonesia*. Jurnal Administrasi Negara. Volume 29 Nomor 3, Edisi Desember 2023. p-ISSN: 1410-8399,E-issn:2615-3424.
- Jadoon, A. K. et. al. (2021). MINIMUM WAGES AND POVERTY : A CROSS-COUNTRY ANALYSIS Keyword s. *Asian Economic and Financial Review MINIMU*, 11(8), 632–643. <https://doi.org/10.18488/journal.aefr.2021.118.632.643>
- Kompas, 2024. (n.d.). *Warga Miskin Jateng Masih 3,7 Juta Penduduk, di Atas Persentase Kemiskinan Nasional*.
- Ladjin, N., Mambuhu, N. M., & Rahayu, S. (2024). DETERMINATION OF DISTRICT / CITY POVERTY LEVELS IN CENTRAL SULAWESI PROVINCE AUTOREGRESSIVE DISTRIBUTED LAG (ARDL) APPROACH. *REVISTA DE GESTAO SOCIAL E AMBIENTAL*, ISSN: 1981(<https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n6-066>), 1–14.
- Murialti, N., Hadi, M. F., Hidayat, M., Minovia, A. F., & Ramadona, M. (2025). The Role of Government Spending , FDI , and Infrastructure Energy on Poverty between Regions in Riau Province ; Spatial Approach. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 15(2), 352–359.
- Muryani and Larasati, A. N. (2024). The Influence of Gross Regional Domestic Product (PDRB), Education Health , and Unemployment on The Poverty Rate in Regencies / Cities of East Nusa Tenggara Province. *Internasional Journal of Research in Social Science and Humanities (IJRSS)*. E-ISSN:2582-6220.DOI: 10.47505/IJRSS.2024.6.4. Vol. 5 (6) June -2024., 5(6), 43–56. <https://doi.org/10.47505/IJRSS.2024.6.4>
- Paz-b, M. A. De, & Celia, S. (2024). *Effects of the Minimum Wage (MW) on Income Inequality : Systematic Review and Analysis of the Spanish Case*.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementerian Sosial.
- Putri, C. & Y. (2025). Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Laju Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, Vol. 8 No.(Januari 2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.36778/jesya.v8il.1859>
- Riyandini, S. (2024). Analisis Pengaruh IPM, Upah Minimum, TPT, dan Bantuan Sosial Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2022. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 3(4), 1270–1285.
- Saefullah, E. et. a. (2023). THE EFFECT OF COVID-19 PANDEMIC, GRDP, AND THE CITY/DISTRICT MINIMUM WAGES ON THE POVERTY IN BANTEN PROVINCE ON THE OPEN UNEMPLOYMENT RATE AS A MEDIATION VARIABLE. *Internasional Journal of Professional*, 8(5), 1–16.
- Sinaga, M. (2018). *Analysis of Effect of GRDP (Gross Regional Domestic Product) Per Capita , Inequality Distribution Income , Unemployment and HDI (Human Development Index) on Poverty*. 2309–2317.
- Sutrisno. (2022). THE IMPACT OF PROVINCIAL MINIMUM WAGE INCREASES AND ECONOMIC GROWTH RATES ON POVERTY LEVELS IN DKI JAKARTA. *Jurnal Ekonomi*, Volume 11, No 03, 2022, 11(03), 1365–

1371.

- Teeson, C. J., & Sivadas, R. K. (2024). Multidimensional Poverty and Local Governance : Analysis Through Systematic Review of the Literature Multidimensional Poverty and Local Governance : Analysis. *Journal of Poverty*, 00(00), 1–28. <https://doi.org/10.1080/10875549.2024.2379779>
- Tope, P., Kasim, M. Y., & Ichwan, M. (2025). Impact of Gini Ratio , Economic Growth and Unemployment on Poverty Levels : A Panel Data Analysis. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 15(5), 65–70.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Wahyuningsih, D., Yunaningsih, A., Priadana, M. S., & Darma, D. C. (2020). Why are Unemployment and Poverty Still Happening in Borneo Island , Indonesia ? *International Journal of Economics and Financial Issues*, 10(2), 235–241.
- Wicaksono, A. (2025). (n.d.). 23,85 Juta Rakyat RI Masih Hidup Miskin per Maret 2025.
- Yoga, G.A.D.M & Diputra, G. I. . (n.d.). Analisis Data Panel Determinan Kemiskinan Melalui Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali. *EKUILNOMI: Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol 6 No 1 Februari 2024. DOI:10.36985/Ekuilnomiv6i1.1070*.